



Australian Government

Kartu Identitas Anak dan Kolaborasi Bersama Sekolah



Pokja Adminduk Desa Muer bekerja sama dengan PAUD Gesit Insani menyediakan layanan pengurusan KIA.

Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kunci bagi anak untuk mendapatkan haknya menerima pelayanan sosial dasar. Sayangnya, warga Kabupaten Sumbawa selama ini merasa kesulitan mendatangi kantor Disdukcapil. Jauhnya jarak dan tingginya biaya perjalanan jadi sebab rendahnya kepemilikan dokumen. Difasilitasi KOMPAK, Bappeda dan Dukcapil Sumbawa berinisiatif menggandeng para pemangku kepentingan yang berkarya dalam area pelayanan dasar masyarakat, termasuk guru-guru PAUD dan SD. Kolaborasi dengan mereka terbukti sangat efektif meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA di Kabupaten Sumbawa.

Sekian lama menanti, Onoor Malik Muttazam (5) gembira bukan kepalang begitu mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA). Ia mengantongi kartu tersebut ke mana pun pergi dan tak henti memamerkannya dengan penuh rasa bangga pada rekan-rekannya yang belum memiliki KIA. "Senang sekali akhirnya saya punya kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) baru," ujarnya polos, berpikir bahwa KIA sama dengan kartu ATM karena bentuknya yang mirip.

Orang tua Onoor, M. Jafar (42) dan Masriati (48) yang sehari-harinya mencari nafkah sebagai petani jagung dan padi turut menarik napas lega. Tinggal di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat – mereka tak sanggup mengurus pemutakhiran KK dan pengajuan KIA bagi Onoor. Pergi ke kantor Disdukcapil terdekat bukan perkara mudah. Selain jarak jauh yang terlalu memakan waktu (sekitar 55 kilometer), mereka juga tak mampu membiayai perjalanan pulang-pergi dengan transportasi umum yang menguras biaya minimal Rp50.000.

Padahal, keduanya sadar bahwa anak bungsunya kelak membutuhkan KIA untuk mendaftar SD. Mereka bersyukur ketika suatu hari mendengar kabar dari PAUD Gesit Insani tempat putranya menimba ilmu. Ibu guru Yuly Suryani (32) bersama Ketua Kelompok Kerja Administrasi Kependudukan (Pokja) Adminduk Desa Muer, Evi Sulfiati (36), bersedia membantu mengajukan KIA.

Yuly dan Evi mendatangi langsung kediaman Onoor untuk mempermudah orang tuanya melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan, yakni surat keterangan lahir Onoor dari bidan/dokter dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbaharui. Seminggu kemudian, Onoor sudah memperoleh KIA, kartu “ATM”

yang akan mempermudahnya menimba ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui *Focus Group Discussion* atau FGD yang difasilitasi KOMPAK, Dukcapil dan Bappeda sepakat melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial) untuk membantu mempercepat pemenuhan akta kelahiran dan KIA. Lahirnya Perbup No. 24/2018 menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar lembaga. ■

“Kami sangat bersyukur ada petugas Pokja (Adminduk) yang datang ke rumah sampai semuanya beres. Kami juga sangat terbantu karena bisa menghubungi mereka kapan saja,” ucap Masriati.

Upaya Yuly dan Evi terjun langsung membantu para orang tua mengurus KIA bagi putra-putrinya merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan terpadu dan Desa/Kelurahan”.

Pada jalur pendidikan, pelayanan adminduk melibatkan PAUD dan SD. Sekolah mempermudah petugas adminduk menyosialisasikan sekaligus membantu orang tua mengurus Akta Lahir dan KIA bagi putra-putrinya. Proses pengurusan dimulai dengan mendata para siswa yang belum memiliki Akta Lahir dan KIA. Setelah data terkumpul, sekolah bersama Pokja Adminduk membantu orang tua mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen ke Disdukcapil.

Inisiatif ini berangkat dari temuan Disdukcapil Kabupaten Sumbawa yang mendapati rendahnya angka kepemilikan Akta Lahir dan KIA. Tahun 2016-2017, rata-rata anak yang memiliki Akta Lahir baru 72% atau masih di bawah target nasional (93%). Penyebab utamanya adalah keterbatasan jangkauan layanan Dukcapil mengingat geografis Sumbawa yang amat luas dengan kontur bervariasi.

Melalui *Focus Group Discussion* atau FGD yang difasilitasi KOMPAK, Dukcapil dan Bappeda sepakat melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial) untuk membantu mempercepat pemenuhan akta kelahiran dan KIA. Lahirnya Perbup No. 24/2018 menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar lembaga.

Sejak itu, Dukcapil menerima permintaan dokumen penerbitan Akta Lahir dan KIA lewat Puskesmas, PAUD-SD, dan Dinas Sosial. Hasilnya terbilang memuaskan. Tahun 2019, kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Sumbawa mencapai 95,87%, melebihi target nasional (93%). Hingga Desember 2020, kepemilikan Akta Lahir usia di bawah 18 tahun mencapai 97,99%. Kepemilikan KIA saat ini juga sudah mencapai 17%, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2020 yang hanya berkisar 9%. Dukcapil menargetkan kepemilikan KIA hingga akhir 2021 sebesar 30%, sesuai target nasional.

“Sebagian besar orang tua sebetulnya sudah paham pentingnya Akta Lahir dan KIA, apalagi Akta Lahir menjadi syarat mendaftarkan anak di PAUD. Masalahnya, banyak yang belum tahu kalau kini mereka bisa mengurus dokumen lewat Pokja Admindak yang bermitra dengan sekolah. Itu sebabnya saya terus melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengumpulan berkas persyaratan,” terang Yuly.

“Saat ini kami tak lagi banyak mendengar anak-anak tidak diterima bersekolah di PAUD/SD atau tidak dapat mengakses dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya karena tidak punya Akta Lahir dan KIA. Seluruh lokasi pelayanan dasar seperti sekolah dan Puskesmas telah ditunjuk sebagai tempat pelayanan admindak,” jelas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, Jaya Kusuma (52).

Ibu guru Yuly menambahkan, kerja sama antara sekolah dengan Pokja Admindak sangat membantu para orang tua yang sebagian besar petani untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi yang sangat penting bagi masa depan anak-anaknya. Oleh karenanya, sosialisasi kerja sama ini perlu terus digiatkan mengingat masih banyak orang tua yang belum mengetahuinya.

“Sebagian besar orang tua sebetulnya sudah paham pentingnya Akta Lahir dan KIA, apalagi Akta Lahir menjadi

syarat mendaftarkan anak di PAUD. Masalahnya, banyak yang belum tahu kalau kini mereka bisa mengurus dokumen lewat Pokja Admindak yang bermitra dengan sekolah. Itu sebabnya saya terus melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengumpulan berkas persyaratan,” terang Yuly.

Prosesnya tidaklah rumit. Guru terlebih dulu menjadwalkan pertemuan dengan orang tua atau wali murid untuk menjelaskan tentang Akta Lahir dan KIA. Orang tua yang putra-putrinya belum punya Akta Lahir dan KIA diminta melengkapi berkas persyaratan, lalu menyerahkannya ke suatu tempat yang disepakati. Petugas Pokja Admindak segera melakukan verifikasi dan membawanya ke kantor Disdukcapil. Setelah terbit, dokumen diantar langsung ke rumah masing-masing orang tua murid.



▲ Layanan Pokja Admindak Keliling di sekolah untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk meluaskan jangkauan sosialisasi, Yuly juga berinisiatif menggandeng para kepala dusun dan ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membantu pendataan dan pengumpulan berkas-berkas warga. Menurut Evi, sejak 2001 seluruh berkas pengajuan yang masuk akan diproses hari itu juga dan dipastikan terbit keesokan harinya jika tidak ada kendala.

Kolaborasi Yuly dan Evi membuahkan hasil amat menggembirakan. Yuly menerima berkas-berkas persyaratan hingga dua kali seminggu. Sejak 2020 hingga awal 2021, Evi dan Disdukcapil Kabupaten Sumbawa pun telah menerbitkan lebih dari 300 KIA. Dengan demikian, capaian penerbitan KIA sejak 2020 hingga Februari 2021 berjumlah lebih dari 15.000 KIA. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah

seiring intensifnya kolaborasi yang dilakukan sekolah dan Pokja Adminduk.

Pandemi COVID-19 tidak menghentikan upaya sekolah dan Pokja Adminduk melayani warga yang ingin mengajukan dokumen kependudukan, termasuk perubahan KK pada kelompok lanjut usia. Disdukcapil Kabupaten Sumbawa hanya melakukan pembatasan layanan hingga pukul 12.00 WITA. ■

“Para orang tua merasa sangat terbantu. Sekarang malah banyak masyarakat datang langsung ke rumah saya membawa berkas masing-masing,” cerita Evi.

Pandemi COVID-19 tidak menghentikan upaya sekolah dan Pokja Adminduk melayani warga yang ingin mengajukan dokumen kependudukan, termasuk perubahan KK pada kelompok lanjut usia. Disdukcapil Kabupaten Sumbawa hanya melakukan pembatasan layanan hingga pukul 12.00 WITA.

Koordinasi antara sekolah dan Pokja Adminduk juga terus berlanjut dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp Group*. Aktivitas pendataan dan pengumpulan berkas dokumen siswa oleh para guru PAUD/SD juga tetap

dilakukan dengan cara “jemput bola” ke rumah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker dan menjaga jarak aman.

Tingginya antusiasme warga membuat Jaya Kusuma sangat optimis pihaknya dapat memenuhi target nasional 30% kepemilikan KIA pada akhir 2021, sekalipun Sumbawa masih dilanda pandemi. Jaya yakin Perbup Sumbawa No. 24/2018 yang diimplementasikan melalui layanan *3 in 1* dan “langsung cetak di lapangan” dapat mempercepat kepemilikan dokumen adminduk lainnya seperti KK dan KTP.



▲ Salah satu anak yang sudah mendapatkan KIA yang sudah jadi.